

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN  
EKOSISTEM HUTAN MANGROVE BERBASIS MASYARAKAT DI DESA  
BUSUNG TAHUN 2014**

**NASKAH PUBLIKASI**



**OLEH :  
RAJA FAJAR NUGRAHA  
NIM: 110565201166**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALIHAJI  
TANJUNG PINANG  
2016**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN  
EKOSISTEM HUTAN MANGROVE BERBASIS MASYARAKAT DI DESA  
BUSUNG TAHUN 2014**

**RAJA FAJAR NUGRAHA**

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan ,FISIP UMRAH

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat adalah program ITTO RED PD 064/11REV.2 (F). program kerjasama antara pemerintah indonesia dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan *Internasional Tropical Timbers Organisaion (ITTO)*. Dinas Pertanian dan Kehutanan memiliki tugas penting dalam pemberdayaan tersebut. Akan tetapi ada beberapa kendala yang masih dihadapi oleh masyarakat sehingga tujuan utama dari program yang telah dilaksanakan ini tidak dapat berjalan dengan *optimal*.

Didalam melakukan penelitian , peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang disusun dalam kalimat. dalam Menguji keabsahan data maka peneliti menggunakan teknik penganalisaan triangulasi, yaitu menganalisa jawab subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data sumber data lainya yang tersedia.

Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini , peneliti menemukan proses komunikasi , pendataan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban sudah berjalan dengan baik , akan tetapi masih ada beberapa kendala yang muncul dimasyarakat seperti kurang nya promosi wisata hutan mangrove sehingga *bout tour mangrove* yang telah diberikan tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Kata Kunci : Pemberdayaan , *mangrove*

**COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM MANAGEMENT THROUGH  
COMMUNITY-BASED MANGROVE FOREST ECOSYSTEM IN THE  
VILLAGE BUSUNG 2014**

**RAJA FAJAR NUGRAHA**

*Students of science Of Government, FISIP UMRAH*

*Empowering communities in the management of community-based mangrove forest is ITTO RED program PD 064 / 11REV.2 (F). Indonesian government's program of cooperation in this case the Ministry of Forestry and the International Tropical Timbers Organisation (ITTO). Agriculture and Forestry has an important task in the empowerment. But there are several obstacles still faced by the community so that the main purpose of the program that has been implemented is not able to run optimally.*

*This research is qualitative research is research on data collected and expressed in the form of words arranged in sentences. Test the validity of the data in the researchers used a technique of analyzing triangulation, which is responsible for analyzing the subject by examining the truth with other data sources of data available.*

*Based on the analysis in this study, researchers found the process of communication, data collection, implementation and accountability has been running well, but there are still some obstacles that arise in the community such as his lack of tourism promotion of mangrove forests that about tour of mangroves that have been granted can not be run like which are expected.*

*Keywords: Empowerment, mangrove*

# **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN MANGROVE BERBASIS MASYARAKAT DI DESA BUSUNG TAHUN 2014**

## **A. Latar Belakang**

Kawasan hutan mangrove mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia dan hewan yang hidup disekitarnya, bahkan bagi makhluk hidup yang hanya tinggal untuk sementara waktu. Berbagai fungsi dan manfaat hutan mangrove bagi manusia dan lingkungan sekitarnya telah diketahui secara umum. Hutan mangrove memegang peranan penting untuk kehidupan laut. Secara ekologis, hutan mangrove juga dapat menjamin terpeliharanya lingkungan fisik, seperti penahan ombak, angin dan intrusi air laut, serta merupakan tempat perkembangbiakan bagi berbagai jenis kehidupan laut seperti ikan, udang, kepiting, kerang, siput, dan hewan jenis lainnya. (Suroso adi yudianto 2008:1)

Adapun arti penting hutan mangrove dari aspek sosial ekonomis dapat dibuktikan dengan kegiatan masyarakat memanfaatkan pohon mangrove untuk mencari kayu , menjadikan buah dari pohon mangrove sebagai bahan pangan seperti tepung , dodol dan juga tempat wisata alam. Selain itu hutan mangrove juga sebagai sumber pendapatan masyarakat nelayan yang sangat tergantung kepada sumberdaya alam dari hutan mangrove.

Keberadaan hutan mangrove saat ini terus merosot dari sebelumnya , disebabkan pembangunan daerah yang semakin pesat. Seperti pembangunan

fasilitas umum dan penimbunan lahan sebagai tempat tinggal. Ekosistem pohon mangrove dapat ditemui di perarian payau yang dekat dengan laut. Dengan potensi tersebut wilayah pesisir dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Seperti hutan mangrove merupakan salah satu sumberdaya pesisir yang berperan penting dalam pembangunan. berdasarkan undang-undang tentang kehutanan nomor 41 tahun 1999 hutan mangrove dikategorikan sebagai hutan lindung yang keberadaannya dilindungi. dengan menjaga dan membudidayakan hutan mangrove sangat dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan serta untuk generasi yang akan datang.

Kabupaten Bintan adalah salah satu kabupaten yang terletak pada provinsi Kepulauan Riau, sebagai satu daerah di Kepulauan Riau dengan jumlah pulau sekitar 241 pulau, Kabupaten Bintan memiliki rentan wilayah pantai yang panjang yaitu sekitar 966,54 km garis pantai yang sangat luas yaitu 86,398,33 km atau 98,51 persen dari total wilayah kabupaten bintan (profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bintan 2013 : 1 )

Dari luasnya garis pantai yang berada di Kabupaten Bintan menjadikan setiap pesisir pantai banyak ditumbuhi tanaman pohon mangrove, namun untuk saat ini pengembangan yang dilakukan guna meningkatkan sumber daya alam hutan mangrove masih belum berjalan dengan baik. Secara geografis, pelestarian hutan mangrove yang berada di Kabupaten Bintan harus dapat dijalankan sebaik

mungkin guna menjaga keseimbangan ekosistem biota laut dan lingkungan alamnya. Dengan pembangunan yang pesat tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dapat menyebabkan permasalahan lingkungan yang nantinya dapat terjadi permasalahan baru seperti banjir , tanah longsor pemanasan global dan lain sebagainya.

Desa Busung mempunyai jumlah penduduk 1.422 jiwa yang tersebar dalam 6 wilayah RT dan 2 wilayah RW. Mayoritas penduduk beragama islam dengan mata pencaharian sebahagian besarnya adalah nelayan sekitar 285 orang. tingkat pendidikan di Desa Busung dengan rincian prasekolah 84 orang , SD 186 orang,SLTP 167 orang , SLTA 213 orang , D1,D2,D3 7 orang , Sarjana (S1) 11 orang . (sumber : profil kelurahan desa busung tahun 2015 )

Dilihat dari kawasan pesisir Desa Busung terdapat beberapa tambang pasir yang saat ini telah ditutup, namun ditutupnya tambang pasir tersebut banyak meninggalkan permasalahan yang mempengaruhi perkembangan lingkungan di daerah itu sendiri. Salah satu permasalahan yang terlihat jelas adalah hutan mangrove yang rusak disebabkan oleh aktifitas pertambangan pasir . Dalam peraturan Presiden nomor 73 tahun 2012 tentang strategi peningkatan ekosistem hutan mangrove di sebutkan bahwa hutan mangrove merupakan sumberdaya lahan basah wilayah pesisir dan sistem penyangga kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi, oleh karena itu perlu upaya perlindungan, pelestarian dan

pemanfaatan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012 tentang tata ruang wilayah Kabupaten Bintan, juga menyebutkan bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Bintan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup.

Hutan mangrove yang terletak di Kecamatan Seri kuala Lobam Desa Busung seluas 8.023 hektar, dilihat dari luasnya hutan mangrove yang ada menjadikan desa busung sebagai salah satu desa wisata mangrove. Dengan demikian pendidikan serta pengetahuan tentang manfaat hutan bakau harus diberikan kepada masyarakat. Pengelolaan ekosistem hutan mangrove dengan melibatkan masyarakat merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan yang menyatukan berbagai kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Pengelolaan ekosistem hutan mangrove berbasis masyarakat (HKM) adalah penggunaan dari sumberdaya yang utama yaitu masyarakat harus menjadi aktor pengelola sumberdaya tersebut. Perlibatan masyarakat diperlukan untuk kepentingan pengelolaan secara berkelanjutan pada sumberdaya, dan pada umumnya kelompok masyarakat yang berbeda akan berbeda pula dalam kepentingannya terhadap sumberdaya tersebut. Pengelolaan sumberdaya tidak akan berhasil tanpa mengikut sertakan semua pihak-pihak yang memiliki kepentingan. kegiatan pemberdayaan masarakat yang dilakukan di Desa Busung

dengan hutan mangrove seluas 8.023 hektar harus bisa dikelola serta dijaga keberadaannya , dengan adanya program pemberdayaan masarakat diharapkan mampu menjadikan satu kemajuan untuk tidak hanya dimanfaatkan namun juga dilestarikan.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini kementrian kehutanan berkerjasama dengan *International Timber Organizaton (ITTO)* melaksanakan program pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat. Program ini telah berjalan pada tahun 2014 lalu yang tujuannya untuk mempromosikan kegiatan pengelolaan ekosistem hutan mangrove secara alami dan lestari berbasis masyarakat di Kabupaten Bintan. Di dalam pelaksanaannya pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian dan Kehutanan kabupaten bintan juga berperan penting dalam menjalankan aktifitas kegiatan.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam program pengelolaan ekosistem hutan mangrove berbasis masyarakat ini adalah, menyusun draft kebijakan strategi dan pengelolaan ekosistem hutan mangrove di Kabupaten Bintan , melaksanakan pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove dan pengolahan produk , memberikan penyuluhan dan fasilitasi kepada masyarakat dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove. Program ini menekankan pada sumber daya utama yaitu masyarakat harus menjadi aktor pengelolaan sumber daya hutan mangrove tersebut dengan yang diharapkan dapat meningkatkan kesempatan akan hasil produksi pohon



mangrove , mengurangi emisi karbon ,peningkatan mata pencarian masyarakat, menghindari kerentanan terhadap bencana.

Peran penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam , terletak pada pemerintah daerah Kabupaten Bintan. pemerintah memiliki fungsi untuk melakukan pemberdayaan masarakat dan fungsi tersebut harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku serta sejalan dengan norma – norma dan kebutuhan pada masyarakat. dengan memperhatikan pertumbuhan lingkungan dapat memberikan manfaat yang banyak bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah Desa Busung.

Pemerintah Kabupaten Bintan , pengelolaan ekosistem hutan mangrove berbasis masyarakat belum berjalan dengan baik, penyeluluhan serta pemberdayaan masih belum berjalan secara optimal, sebab ini terlihat masih adanya masyarakat yang belum paham akan pengelolaan pohon mangrove tersebut .namun beberapa diantaranya masyarakat Desa Busung yang telah mengrti dan memanfaatkan buah pohon mangrove sebagai bahan pangan yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama, Buah mangrove tersebut berbentuk pipih panjang seukuran jari telunjuk dengan panjang sekitar 10 *centimeter*, jenis pohon bakau yang dapat dimanfaatkan adalah dari jenis pohon bakau boros tumu. Selain itu buah pohon bakau juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis makanan dan minuman seperti sirup dan tepung. untuk pengolahan buah pohon bakau ke bahan dasar yang lain masyarakat masih belum mengerti. Dengan adanya program

pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah , diharapkan mampu meningkatkan kualitas masyarakat yang berada pada Desa Busung , sehingga masyarakat mampu berinovasi baru untuk memanfaatkan hutan mangrove sebagai salah satu sumber peningkatan perekonomian. Dan memperbaiki kerusakan ekosistem mangrove yang semakin berkurang keberadaannya. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana efektivitas pemberdayaan yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam menjalankan program Pengelolaan ekosistem hutan mangrove berbasis masyarakat. Untuk itu peneliti mengambil judul tentang

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN MANGROVE BERBASIS MASYARAKAT DI DESA BUSUNG TAHUN 2014.**

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara dan obeservasi antara peneliti dengan informan atau narasumber. Dalam penelitian deskriptif kualitatif peneliti akan memberikan gambaran sistematisfaktual dan akurat mengenai fakta – fakta yang ditemukan pada lokasi penelitian. Sugiyono (2012:12) menyatakan bahwa”penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang di lakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri baik satu variable ataupun lebih tanpa membuat satu perbandingan, atau menghubungkan nya dengan variable lain”.

Sugiono (2005:11) menyatakan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang di lakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri,baik satu variable ataupun lebih tanpa membuat suatu perbandingan , atau menghubungkan satu variable dengan variable lain”.singaribun (2005:4) menyebutkan bahwa “penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat untuk fenomena social tertentu , peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak menggunakan uji hipotesa”

## **C. LANDASAN TEORITIS**

### **a. Pemberdayaan Masyarakat**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan buah bakau menjadi sumber bahan pangan *alternative* yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama. Buah dari pohon bakau dapat diolah menjadi beragam jenis makanan dan minuman, namun proses pemberdayaan jika tidak diiringi dengan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah akan sulit untuk mengetahui apa yang diinginkan masyarakat dan masyarakat akan sulit untuk menyampaikan keluh kesahnya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menuju hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan tenaga kerja dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan social. (Eko.sutoro.2004 : 1)

Hikmat dalam Michel sipahelut (2010:27), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak – haknya menurut undang – undang. Sementara itu, menurut McArdle dalam Michel sipahelut (2010:28) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang – orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. orang-orang yang telah mencapai tujuan

nya yang kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung dari hubungan eksternal.

Michel Sipahelut (2010:27) pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam hal sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber – sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam msyarakat, termaksud individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin di capai oleh

sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun social dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas sosialnya.

Ife dalam Michel Sipahelut (2010:28), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci , yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas, sebagai berikut :

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup kemampuan dalam membuat keputusan – keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan kebutuhannya.
3. Ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbang gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga, kemampuan untuk menjangkau menggunakan dan mempengaruhi prantara-prantara masyarakat, seperti lembaga-lembaga social pendidikan dan kesehatan.
5. Sumber-sumber kemampuan untuk memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.

6. Aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan, sosialisasi dan tujuan

Arti sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai kemampuan atau pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan seringkali diartikan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Kataresmita (2000:50-52) menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat yang dapat berkembang (*enabling*). Dengan titik tolak bahwa setiap manusia dan masyarakat pada dasarnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Jadi pemberdayaan itu adalah merupakan upaya untuk

membangun dan mengembangkan potensi dengan cara mendorong (*encourage*). Memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya.

2. Memperkuat potensi atau daya masyarakat (*empowering*). Untuk memperkuat potensi atau daya masyarakat itu di perlukan langkah – langkah positif yang nyata, dalam wujud penyediaan berbagai input yang dibutuhkan dan pembukaan akses pada berbagai peluang (*opportunities*) yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Dalam konteks ini , upaya yang amat penting dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi, misalnya modal, teknologi ,informasi,lapangan kerja dan pasar.
3. Memberdayakan juga berarti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi tambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu dalam konteks pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan keperpihakan kepada yang lemah harus dilihat sebagai upaya pencegahan terjadinya persaingan yang tidak sehat atau tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

I Nyoman Sumaryadi (2005:100-101), upaya pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan empat unsur pokok , yaitu :



- a. Aksestabilitas informasi*, kemampuan akses yang di terima oleh masyarakat. Aksesibilitas informasi merupakan suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan pencapaian lokasi dan hubungannya satu sama lain, mudah atau sulitnya lokasi tersebut dicapai. , fungsi rendahnya aksesibilitas informasi adalah topografi, sebab dapat menjadi penghalang bagi kelancaran untuk mengadakan interaksi di suatu daerah.
- b. Partisipasi atau keterlibatan*, menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. keterlibatan mental/pikiran atau moral/perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.
- c. Akuntabilitas*, pertanggung jawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatas namakan rakyat. kewajiban pihak untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah.
- d. Kapasitas organisasi lokal*, adalah kemampuan berkerjasama, mengorganisir warga dan masyarakat, serta memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Menurut Wrihatnolo (2007 : 2) Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu:

Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin, kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya.

Tahap kedua adalah pengkapasitasan, Inilah yang sering kita sebut *capacity building* , atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah, seharusnya daerahdaerah yang diotonomkan diberi program pemampuan atau *capacity building* untuk membuat mereka cakap dalam mengelola otonom yang diberikan. Proses *capacity building* terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasi dan sistem nilai.

Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau *empowerment*. Pada tahap ini kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Prosedur pada tahap ketiga ini cukup sederhana, namun kita seringkali tidak cakap menjalankannya karena mengabaikan bahwa dalam

kesederhanaan pun ada ukuran. Pokok gagasannya adalah bahwa proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecakapan penerima.

### **C. Hasil Penelitian**

Pemberdayaan masyarakat, secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui pertama, pengembangan masyarakat, dan yang kedua pengorganisasian masyarakat. apa yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya. kemampuan masyarakat dapat meliputi antara lain kemampuan untuk bertani, berternak, melakukan wirausaha, atau ketrampilan-ketrampilan membuat *home industri* dan masih banyak lagi kemampuan dan ketrampilan masyarakat yang dapat dikembangkan.

Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah program hutan kemasyarakatan yang diselenggarakan di Desa Busung , program ini adalah salah satu bentuk kerja sama antara Kementirian Kehutanan dan *Internasional Tropical Timber Organiasion (ITTO)*. Program ini tidak dapat berjalan secara optimal apabila kurangnya partisipasi dari masyarakat , dalam hal ini masyarakat diikutsertakan dalam program pemberdayaan tersebut.

### **1. Tahapan pemberdayaan dalam program Hutan Kemasyarakatan**

Masyarakat Desa Busung diberdayakan dalam program Hutan kemasyarakatan yang diselenggarakan pada tanggal 18 – 20 maret tahun 2014, Program ini dirancang untuk mengakomodasi minat masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Desa Busung melalui peningkatan kapasitas kelembaga mereka. dari masyarakat sangat berperan penting dalam menjalankan program pemberdayaan , tanpa adanya partisipasi dan kesadaran diri dari masyarakat , pelaksanaan program tidak akan berjalan secara optimal dan jauh dari apa yang telah direncanakan.

Pada hari pertama masyarakat belajar tentang pemberdayaan masyarakat dengan metode praktek lima jari adalah metode yang diciptakan oleh P2MKP Griya Karya Tiara Kusuma , metode praktek lima jari dipersentasikan kedalam desain silabus dan modul sehingga masyarakat akan dapat sangat mudah untuk mengerti. Pada hari kedua masyarakat dipersiapkan untuk praktek dilapangan , mereka membangun area pembibitan mangrove seluas 27 x 11 meter dan 1 meter parit yang mengelilingi zona pembibitan mangrove. Dilapangan para peserta dikelompokkan berdasarkan keahlian dan bidang kerja di kelembagaan seperti Pelestarian mangrove , Ekowisata, Kuliner dan pemanfaatan mangrove, Bank mangrove (pengelolaan sampah).

### **2. Kesadaran masyarakat akan potensi yang dapat berkembang.**

Melalui program hutan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan pada Masyarakat Desa Busung dan Desa Kuala Sempang, masyarakat telah mampu mengembangkan potensi yang ada disekitarnya dengan cara

memanfaatkan buah mangrove menjadi sumber bahan pangan dan wisata mangrove, didalam program hutan kemasyarakatan masyarakat diberikan pelatihan – pelatihan agar pengetahuan masyarakat dapat berkembang serta mampu untuk berinovasi baru terhadap pengembangan potensi sumber daya alam yang ada disekitarnya. akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang telah mempengaruhi perkembangan tersebut, lemahnya promosi wisata mangrove menjadikan perkembangan dimasyarakat menjadi lambat sehingga ini sangat mempengaruhi tujuan utama dari program Hutan Kemasyarakatan.

Pemerintah daerah Kabupaten Bintan Dinas Pertanian Dan Kehutanan telah memberikan dukungan dan motivasi kepada masyarakat dengan cara memberikan program pelatihan hutan kemasyarakatan agar kemampuan masyarakat dapat berkembang, selain itu bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang ikut program pelatihan dalam hal ini bantuan yang diberikan adalah boat tour mangrove yang dapat digunakan kelompok masyarakat dalam meningkatkan matapencahariannya.

### **3. Peningkatan kualitas masyarakat dalam pemberdayaan hutan kemasyarakatan.**

Pada dasarnya kesadaran diri yang tumbuh pada diri masyarakat adalah salah satu indikator kesuksesan dari program yang direncanakan , karena pemberdayaan adalah sebuah bentuk bantuan yang datang untuk golongan masyarakat yang taraf perekonomiannya masih lemah. Didalam

partisipasi masyarakat dalam program hutan kemasyarakatan , jumlah masyarakat yang ikut serta dalam pelatihan ada 22 orang.

Pengetahuan dan keterampilan masyarakat meningkat dengan adanya program hutan kemasyarakatan melalui hasil hutan sebagai salah satu peningkatan mata pencahariannya dalam hal ini masyarakat telah mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan dan telah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat , bantuan itu berupa boat tour mangrove , bangunan pusat informasi mangrove dan pembentukan koprasia simpan pinjam yang dapat digunakan untuk mengembangkan kelompok usaha mereka.

#### **4. Proses pembinaan dan pengawasan dalam program pemberdayaan.**

Pemerintah daerah Kabupaten Bintan Dinas Pertanian dan Kehutanan memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam program Hutan Kemasyarakatan ini , didalam pembinaan masyarakat pihak dinas selalu melakukan kunjungan kerja ke Desa Busung dan Desa Kuala Sempang untuk dapat melihat perkembangan di masyarakat. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Ir. Yeni Kepala sub bidang Kehutanan Kabupaten Bntan , Ibu Yeni mengungkapkan bahwa tim kehutanan selalu mendampingi masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada dengan terus memberikan pelatihan – pelatihan agar perkembangan yang terjadi di masyarakat dapat terus meningkat.

Komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat Desa Busung terlihat baik, sebab Dinas Pertanian dan kehutanan selalu melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk dapat terus melestarikan hutan mangrove , apa yang di butuhkan masyarakat jelas tampak terlihat dengan

adanya boat yang dapat digunakan masyarakat untuk peningkatan ekonomi mereka melalui wisata hutan mangrove yang terbentuk melalui program ini.

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

pemberdayaan tersebut adalah proyek ITTO RED PD 064/11REV.2 (F). adalah proyek kerjasama antara pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Internasional Tropical Timbers Organisation (ITTO). Didalam pengimplementasiannya di daerah Dinas Pertanian dan Kehutanan memiliki tugas penting dalam pemberdayaan tersebut. Pengawasan serta pembinaan telah dilaksanakan demi tercapainya tujuan utama dari program pemberdayaan.

Tujuan dari program ini adalah mempromosikan kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove secara lestari berbasis masyarakat yang berada di kabupaten Bintan. Sedangkan tujuan spesifik dari program pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk mendukung pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, daerah garis pantai dan ekosistem mangrove menjadi sasaran kegiatan *exploitasi* sumber daya alam dan pencemaran lingkungan akibat tuntutan pembangunan.

Berdasarkan kenyataan di atas maka program pemberdayaan masyarakat ini diharapkan ada peningkatan kapasitas masyarakat untuk pengelolaan hutan melalui prinsip – prinsip hutan kemasyarakatan (Hkm). Masyarakat sekitar hutan sudah memiliki akses ke pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan hutan kemasyarakatan . tenaga ahli

langsung didatangkan oleh pemerintah untuk dapat memberdayakan masyarakat, Ibu Tutut sebagai salah satu narasumber yang bergerak dalam bidang pengelolaan ekosistem mangrove memotivasi masyarakat Desa Busung untuk dapat mengolah hasil mangrove sebagai salah satu peningkatan perekonomian. Selain itu ibu Yeni selaku bidang konservasi pengembangan mangrove juga diikutsertakan dalam pengembangan pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat.

Akan tetapi terdapat beberapa kendala yang telah mempengaruhi pengembangan dari wisata tour mangrove dan pengolahan dodol mangrove, kendala tersebut ada pada promosi wisata tour mangrove dan membuat dodol mangrove dapat bertahan lebih lama dalam kemasan yang menarik. Dengan adanya dukungan serta pelatihan yang dilakukan akan sangat membawa dampak yang bagus untuk masyarakat, hingga saat ini pengembangan pengelolaan ekosistem mangrove masih bersifat sebagai tour wisata mangrove dan pengolahan bahan pangan dari mangrove, dibutuhkan waktu dan biaya yang lebih untuk dapat berinovasi baru. Diharapkan program ini juga dapat diterapkan di daerah lain yang berada pada Kabupaten Bintan.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran untuk perbaikan dari program pemberdayaan masyarakat Desa Busung dalam program hutan kemasyarakatan (Hkm). Sehingga Dinas Pertanian dan Kehutanan dapat membentuk program pemberdayaan yang lebih baik lagi :



1. Pengawasan serta pembinaan harus terus dilaksanakan , serta jumlah peserta yang diberdayakan harus diperbanyak lagi sehingga pendidikan serta pengetahuan masyarakat dapat meningkat dengan merata. Dengan meningkatnya kualitas masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan Desa Busung. Komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat harus dapat dijaga , sehingga dalam menyampaikan informasi masyarakat akan dapat dengan mudah untuk mengerti.

Masyarakat juga diharapkan harus berpartisipasi dalam program pemberdayaan apapun , tanpa adanya partisipasi dan kesadaran diri dari masyarakat tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat akan sulit dicapai. Masyarakat juga harus aktif dalam menyampaikan pendapat sehingga pemerintah dapat memberikan solusi terhadap masalah apa saja yang terjadi. Dengan adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat tujuan pemberdayaan akan mudah untuk dicapai.

2. Diharapkan kepada pemerintah baik itu Dinas Pertanian Dan kehutanan , pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam memberikan bantuan harus ada koordinasi yang baik , sehingga segala urusan dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam masyarakat. Pemerintah Desa juga harus mampu membina dan mendampingi masyarakat dalam berinovasi baru sehingga kemajuan masyarakat menjadi salah satu faktor kesuksesan program pemberdayaan masyarakat tersebut. Bantuan yang telah diberikan harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga

fasilitas tersebut dapat terus digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dimasa yang akan datang.

3. Diharapkan kepadamasyarakat Desa Busung agar terus menjaga keseimbangan ekosistem hutan mangrove yang ada , sebab hutan mangrove sangat bermanfaat untuk kehidupan alam sekittar dan menjadi pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat yang berkerja sebagai nelayan. Dengan merawat hutan mangrove , masyarakat akan sangat mudah untuk mendapatkan ikan , ini bisa dibuktikan dengan banyak nya biota laut yang tumbuh dan berkembang dibawah pohon mangrove. Kesadaran diri yang tinggi menjadi hal utama dalam menjaga lingkungan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2004
- Daeng Ayup Natuna, Rumzi Samin, Edy Akhyari, , *Pendidikan dan Pembangunan Berbasis Maritim*. Tanjung Pinang, UMRAH Perss 2009
- Eko Sutoro, *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, APMD Perss , 2004
- Kartasmita, Ginandjar 2000. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* . Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo.
- Kusmana, C. 2005. *Rencana Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai Pasca Tsunami di NAD dan Nias* . , Medan, April 2005

Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PEMBARUAN.

Moleong, J. Lexy. 2006. *Metode penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Perss

Pramudji. 2000. *Dampak Perilaku Manusia Pada Ekosistem Hutan Mangrove di Indonesia* dalam Osean, Volume XXV, Nomor 2, 2000; 13-20.

Randy Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowito, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007)

Rahardjo Adisasmita, Prof., Dr., M.Ec. *Pembangunan Perdesaan; Pendekatan*

*Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. (Jakarta 2011)

Sipahelut. Micel. 2010 *Analisis Pemberdayaan masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmaera Utara*. Tesis Institut Pertanian Bogor.

Sumaryadi. I Nyoman . 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama

Sofian Efendi & Tukiran *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES, 2012 cetakan ketiga puluh (Edisi Revisi)

Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung, Alfabeta. 2010

Surito Handoyo. *Arahan kebijakan pengelolaan Hutan mangrove kasus pesisir kecamatan teluk pengudai Kabupaten Kubuk Raya Kalimantan Barat*. ,Skripsi. Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan PGRI.

Suparjan dan Hempri Suyatno. *Pengembangan Masyarakat, Pembangunan*

*sampai Pemberdayaan*. Aditya Media : Yogyakarta 2003.

### **Undang – undang**

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Presiden nomor 73 tahun 2012 tentang strategi peningkatan ekosistem hutan bakau

Peraturan daerah Kabupaten Bintan Nomor 22 Tahun 2012 tentang tata ruang wilayah Kabupaten Bintan

**Dokumen**

Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan 2013 : 1

Profil Kelurahan Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan

Profil Program ITTO 2014